

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini setiap negara pasti membutuhkan pemerintahan yang baik atau yang biasa disebut sebagai *Good Government Governance* diseluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dengan bergulirnya otonomi daerah merupakan bagian dari reformasi hidup dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam segelintir bidang diubah menjadi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan populasi lebih dari 273 juta jiwa menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan pangan. Isu ketahanan pangan menjadi prioritas nasional karena berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Rokan Hulu terletak di Provinsi Riau, Sumatera, Indonesia. Berdiri pada tahun 1999 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar, Rokan Hulu memiliki luas wilayah 7.588,13 km² dan jumlah penduduk 54.739 jiwa (2020).

Kabupaten Rokan Hulu, merupakan daerah dengan potensi pertanian yang besar. Namun, ketahanan pangan di daerah ini masih menghadapi tantangan. Salah satunya adalah ketergantungan impor beras yang tinggi. Hal ini menyebabkan harga beras fluktuatif dan mempengaruhi ketersediaan pangan lokal.

Pada tahun 2022, produksi beras di Rokan Hulu hanya mencapai 120.000 ton, sedangkan kebutuhan beras mencapai 180.000 ton. Kekurangan ini menyebabkan impor beras dari Jawa dan Sumatera Barat. Kondisi ini memperburuk ketahanan pangan dan mengancam kemandirian ekonomi lokal.

Selain itu, produktivitas pertanian di Rokan Hulu relatif rendah dibandingkan dengan kabupaten lain di Riau. Hal ini disebabkan oleh kurangnya teknologi dan pelatihan bagi petani. Kerusakan lahan akibat perambahan hutan dan kegiatan pertambangan juga memperburuk kondisi. Kondisi ini berdampak pada masyarakat, terutama petani dan masyarakat miskin. Mereka kesulitan mengakses pangan yang seimbang dan bergizi. Malnutrisi dan gangguan kesehatan menjadi permasalahan yang serius. Dinas Ketahanan pangan sebagai lembaga pemerintah memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Kinerja dinas ini sangat dipengaruhi oleh pengelolaan anggaran yang efektif. Realisasi anggaran adalah proses pelaksanaan atau pencapaian target anggaran yang telah ditetapkan. istilah ini umum digunakan konteks keuangan pemerintah, perusahaan, atau organisasi.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu memiliki anggaran sebesar Rp. 1,2 triliun untuk tahun 2022. Anggaran ini, dialokasikan untuk berbagai sektor, termasuk pendidikan, pangan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi. Realisasi anggaran ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Badan pusat statistik, 2020).

Tabel 1.1
Data APBD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan
Hulu 2021-2024

NO	TAHUN	PAGU DANA	REALISASI
1	2021	9.813.201.965,00,-	9.492.547.393,00,-
2	2022	8.623.810.584,00,-	8.019.681.512,00,-
3	2023	10.222.684,436,00,-	9.912,883,988,00,-
4	2024	7.547.472.046,00,-	5.637.960.548,00,-

Sumber : Pemerintahan Daerah

Akuntansi sektor publik mulai berkembang pesat setelah diberlakukannya kebijakan tentang otonomi daerah di era reformasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengelola keuangannya secara tertib, efektif, efisien serta transparan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku demi terwujudnya *good governance*. Dalam menyusun rencana anggaran suatu daerah otonom, tahap pertama yang dilakukan Pemerintah daerah adalah tahap perencanaan anggaran yang disajikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tujuan utama dalam pembuatan APBD pada anggaran Pemerintah daerah yaitu sebagai pedoman dalam hal penerimaan dan pengeluaran penyelenggaraan program atau kegiatan pemerintahan yang hendak dilaksanakan, serta mengetahui bagaimana proses perealisasi anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan

Menurut Mahmudi (2016: 21) “Efektivitas yaitu hasil perbandingan antara target dengan hasil yang dicapai sesungguhnya”. Efektivitas digunakan untuk mengukur pendapatan suatu entitas dengan target yang telah ditetapkan. Sedangkan efisiensi menurut Mahmudi (2016: 164) “Efisiensi yaitu perbandingan realisasi anggaran dengan rencana anggaran yang ditetapkan sebelumnya untuk

mengetahui tingkat penghematan anggaran belanja pemerintah”. Segala sesuatu dapat dikatakan efisien baik organisasi ataupun program kerjanya, jika dapat menghasilkan output yang maksimal dengan input seminimal mungkin.

Dalam konteks pengelolaan keuangan publik, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran oleh Dinas Ketahanan Pangan sangat menentukan keberhasilan program-program yang dijalankan. Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana tujuan program dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sedangkan efisiensi menekankan pada optimalisasi penggunaan sumber daya, termasuk anggaran, untuk meminimalisir pemborosan.

Namun, dalam praktiknya, seringkali ditemukan permasalahan terkait pengelolaan anggaran, seperti alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran, rendahnya realisasi anggaran, atau kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan program. Hal ini dapat berdampak pada tidak tercapainya tujuan program ketahanan pangan secara optimal. Selain itu, isu transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran oleh instansi publik masih menjadi perhatian penting bagi masyarakat dan pemangku kepentingan.

Pemerintah sekarang ini dihadapkan oleh banyaknya tuntutan baik dari segi internal yaitu peningkatan kinerja yang optimal dan segi eksternal yaitu adanya tuntutan masyarakat yang menghendaki, agar pemerintah daerah mampu menciptakan tujuan masyarakat daerah yang sejahtera sebagai suatu implikasi dari penerapan otonomi daerah yang mengedepankan akuntabilitas kinerja dan peningkatan pelayanan publik (Abdul Halim: 2007).(Rahmad Hidayat, 2015).

Selanjutnya, Undang –Undang No. 17 Tahun 2003 tentang perimbangan keuangan negara akan pula diterapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja di sektor publik agar penggunaan anggaran tersebut bisa dinilai kemanfaatan dan kegunaannya oleh masyarakat. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 menetapkan bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai. Untuk mendukung kebijakan ini perlu dibangun suatu sistem yang dapat menyediakan data dan informasi untuk menyusun APBD dengan pendekatan kinerja Anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Adapun kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik.(Mariana 2005). Melalui Permendagri No. 13 Tahun 2006 implementasi pradigma baru yang berorientasi pada prestasi kinerja dapat diterapkan dalam penyusunan APBD, baik dalam sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah.

Oleh karena itu, diperlukan suatu laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah berikut dengan analisis prestasi pengelolaan sumber daya keuangan daerah itu sendiri (Bastian 2006:6). Hal tersebut sesuai dengan ciri penting dari suatu daerah otonomi yang mampu menyelenggarakan otonomi daerahnya yaitu terletak pada strategi sumber daya manusia (SDM) dan kemampuan dibidang keuangan daerah (Soedjono, 2000).

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dikutip dari jurnal Tandri (2015), Efektivitas dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat membawa hasil atau berhasil guna. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah

suatu tingkat prestasi organisasi dalam tujuannya, yang berarti bahwa kesejahteraan tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Pengendalian internal menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008, menyatakan bahwa sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamatan aset negara dan ketaatan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini berfokus pada analisis efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam program ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu. Dengan menganalisis sejauh mana anggaran digunakan secara efektif dan efisien, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kinerja keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depan.

Berdasarkan latar Belakang masalah, maka penting dilakukan riset terkait oleh penulis dengan judul **“Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Dalam Program Ketahanan Pangan Oleh Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas penggunaan anggaran dalam program ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh dinas ketahanan pangan dan perikanan kabupaten Rokan Hulu?
2. Bagaimana efisiensi pengelolaan anggaran dalam pelaksanaan program ketahanan pangan oleh dinas ketahanan pangan dan perikanan Kabupaten Rokan hulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan ditinjau dari rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk menganalisis tingkat efektivitas penggunaan anggaran dalam program ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh dinas ketahanan pangan dan perikanan Kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk menganalisis efisiensi pengelolaan anggaran dalam pelaksanaan program ketahanan pangan oleh dinas ketahanan pangan dan perikanan kabupaten Rokan hulu.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti atau penulis karya ilmiah ini dapat menjadi bahan menambah wawasan dan pengetahuan akademis,peneliti akan mendapatkan pemahaman mendalam mengenai konsep efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran

publik, khususnya dalam konteks program ketahanan pangan. Hal ini memperkaya pengetahuan akademis di bidang manajemen keuangan publik dan kebijakan pemerintah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi dinas ketahanan pangan dan perikanan Kabupaten Rokan Hulu dalam melihat sejauh mana penggunaan anggaran telah efektif dan efisien dalam mendukung program ketahanan pangan serta mendorong perbaikan pengelolaan anggaran dan memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran.

1.5 Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran umum dari sistematika penulisan proposal ini sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan membahas penjelasan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan teori – teori yang mendukung permasalahan sehingga peneliti memiliki dasar dalam menguraikan objek penelitian yang diangkat oleh peneliti.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti membahas mengenai metode penelitian yang didalamnya memberikan gambaran tentang tujuan penelitian dan

defenisi operasionalisasi variabel penelitian,jenis dan sumber data, teknik penentuan populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan metode analisis data dan uji hipotesis.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini yang berisi tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Deskripsi Temuan Penelitian dan Pembahasan.

BAB V: PENUTUP

Terdiri dari Kesimpulan dan Saran-Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Deskripsi Teori

2.1.1 Pengertian Teori Efektivitas

Efektivitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberikan guna yang diharapkan untuk melihat efektivitas kerja yang pada umumnya dipakai empat macam pertimbangan yaitu: Pertimbangan ekonomi, pertimbangan fisiologi, pertimbangan psikologi dan pertimbangan sosial Permata Wisha (1992) Efektivitas adalah hasil keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan Amin Tunggal Widjaya (1993) Efektivitas merupakan ukuran sejauh mana tujuan organisasi atau program dapat dicapai sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Menurut H.Emerson dalam teorinya, efektivitas didefinisikan sebagai “*the ability to choose appropriate objectives and achieve them*”.

Dalam konteks penggunaan anggaran, efektivitas dapat diukur dari kesesuaian antara realisasi anggaran dengan sasaran program, serta tingkat pencapaian hasil program ketahanan pangan sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan. Indikator Efektivitas meliputi pencapaian tujuan program, ketepatan sasaran, dan dampak program terhadap penerima manfaat.

Menurut Adisasmita (2014:170) mendefinisikan bahwa pengukuran efektivitas adalah suatu kondisi atau keadaan dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan disertai dengan tujuan yang

diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan. Untuk mengetahui seberapa jauh target yang telah dicapai maka perlu dilakukan pengukuran efektivitas, dengan rumus yang dapat digunakan yaitu:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)}} \times 100\%$$

Nilai Efektivitas diperoleh dari perbandingan sebagaimana tersebut diatas diukur dengan kriteria keuangan yang disusun dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Persentase	Kriteria
100% Keatas	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Dibawah 60%	Tidak Efektif

Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan. Kriteria rasio efektivitas keuangan daerah dapat mengacu pada tabel 1.6 pada pembahasan latar belakang sebelumnya. Guna memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektivitas tersebut perlu dilengkapi dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah daerah.

2.1.2 Teori Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan optimalisasi sumber daya untuk mencapai hasil tertentu. Menurut Fredick Taylor, Efisiensi di definisikan sebagai *"Doing things right with minimal cost or resources"* .Dalam pengelolaan anggaran publik,

efisiensi mencakup perbandingan antara input (Alokasi anggaran) dengan output (Hasil program) .Serta Penggunaan anggaran yang tepat ,hemat, dan tidak terjadi pemborosan.

Menurut Mardiasmo (2009:132) mengemukakan efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas yang menunjukkan kehematan baik dari segi waktu, tenaga dan biaya. Menurut Mahsun dalam sumenge, tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan total realisasi anggaran belanja, dengan rumus berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 2.2
Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Persentase	Kriteria
100% keatas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Efisien
Dibawah dari 60%	Sangat Efisien

Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327

Indikator efisiensi meliputi Rasio input dan Output dan penggunaan waktu serta biaya yang minimal untuk mencapai tujuan program.

2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Halim dan Kusufi (2012), APBD adalah rencana operasional keuangan pemda, dimana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan pihak lain menggambarkan perkiraan

dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, fungsi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Otorisasi, artinya anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi Perencanaan, artinya anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi Pengawasan, artinya anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi Alokasi, artinya anggaran daerah harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi Distribusi, artinya kebutuhan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

2.1.4 Teori Pengelolaan Anggaran

Pengelolaan Anggaran publik berlandaskan pada prinsip-prinsip akuntabilitas,transparasi,efektivitas,dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya keuangan negara. Menurut Mardiasmo (2009), Pengelolaan anggaran mencakup :

1. Perencanaan Anggaran :

Proses Menyusun rencana anggaran berdasarkan kebutuhan dan prioritas program untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi atau instansi.

2. Pelaksanaan Anggaran:

Tahap Merealisasikan anggaran sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan dan disusun.

3. Pengawasan Anggaran:

memastikan Anggaran digunakan sesuai dengan perencanaan dan mencegah pemborosan

4. Evaluasi Anggaran :

Menilai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran.

2.1.5 Konsep Ketahanan Pangan

Menurut *FAO (Food and Agriculture Organization)*, Ketahanan Pangan adalah *“A Condition where all people,at all time,have physical,social,and economic access to sufficient,safe,and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life”*

Ketahanan pangan mencakup :

1. Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan adalah kondisi ketersediaan bahan makanan yang cukup,aman,dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tercukupinya jumlah dan kualitas pangan yang dibutuhkan.

2. Aksesibilitas Pangan

Merupakan Kemampuan Masyarakat dalam mendapatkan pangan yang aman bergizi dan memadai secara ekonomi dan fisik.

3. Stabilitas pangan

Kondisi Ketersediaan pangan yang berkelanjutan dalam jangka panjang dan konsisten, sehingga masyarakat akses kepangan yang aman, bergizi, dan memadai. Program ketahanan pangan oleh dinas ketahanan pangan bertujuan untuk memastikan terpenuhinya ketiga pilar tersebut melalui berbagai kegiatan dan intervensi yang membutuhkan pengelolaan anggaran secara optimal.

2.2 Hasil Penelitian yang Relefan

Tabel 2. 3
Penelitian relefan

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Peneliti
1.	Dyah Ayu Perwitasari, 2022	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Keuangan pada Dinas pertanian, ketahanan pangan dan perikanan kota probolinggo periode 2020.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran keuangan pengelolaan keuangan pada dinas pertanian, ketahanan pangan dan perikanan kota probolinggo periode 2020 yaitu sebesar 114% ,tingkat efisiensi periode 2020 yaitu sebesar 96,92% bahwa dapat dikatakan kurang efisien.
2.	Rosmini, 2021	Analisis Efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan

		desa (APDES) pada desa plampang kabupaten sumbawa.	yang terdiri dari rasio kemandirian menunjukkan bahwa berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio Efektivitas, rasio Efisiensi, dan pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
3.	Anto Triaanto, 2013	Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Palembang.	Hasil yang didapat menunjukkan bahwa secara keseluruhan, rata-rata nilai rasio efektivitas keuangan daerah kota Palembang periode 2003-2013 mencapai tingkat yang efektif. Sementara itu, tingkat efisiensi keuangan daerah kota Palembang selama periode 2003-2013 rata-rata berada pada tingkat kurang efisien dan tidak efisien.
4.	Raafi Melati Putri, Indri Yuliasafitri 2024	Analisis Efektivitas dan Efisiensi anggaran belanja operasional tahun anggaran 2019-2022 (studi kasus Pada Dinas-Dinas Di kota Bandung).	Hasil yang didapat memberikan bukti Realisasi anggaran operasional kota Bandung dari tahun 2019-2022 menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup efektif (84%). Meskipun realisasinya

			cenderung lebih rendah dari target. Secara efisiensi, berhasil menghemat anggaran operasional dengan predikat sangat efisien (12%).
5.	Muhammad Jarkasih, Dr. Titin Ruliana, Ida Rachmawati. 2020	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan anggaran belanja dinas pangan, tanaman pangan dan hortikultura provinsi Kalimantan timur.	Pelaksanaan anggaran belanja pada tahun anggaran 2018 dan 2020 dilihat dari analisis efektivitas dinilai cukup efektif berada pada angka 80%, sedangkan tahun 2018-2020 dilihat dari analisis efisiensi dinilai tidak efisien berada pada angka 100%.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Dengan melihat tema atau judul penelitian ini, maka peneliti menunjuk tempat penelitian atau yang menjadi lokasi penelitian Ini adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu Beralamat di Desa Koto tinggi, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Dan termasuk didalamnya beberapa pihak yang dapat dijadikan beberapa informan penunjang penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi dalam Efektivitas dan Efisiensi penggunaan Anggaran dalam program ketahanan pangan di Dinas Ketahanan pangan dan perikanan kabupaten Rokan Hulu.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di pakai adalah jenis Metode penelitian kuantitatif Spesifiknya, jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah penulisan laporan yang bertitik pada masalah yang ada sekarang, bertujuan untuk memberikan gambaran keadaan yang sebenarnya dengan melakukan kegiatan penelitian lapangan, observasi, wawancara. Penelitian deskriptif kuantitatif yang artinya lebih melihat masalah tentang manusia dan sosial dimana penulis melakukan penelitian secara alami dari subjek yang berada di lingkungan sekitar dan bukan hasil atau manipulasi variabel yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan fenomena atau gejala secara sistematis dan akurat dengan menggunakan data numerik secara sistematis dan akurat dengan menggunakan data numerik (Gunawan, 2014:15)

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian adalah informasi yang harus dikumpulkan yang berkaitan dengan judul penelitian. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa kata-kata, gambar, dan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan penelitian kuantitatif. Peneliti kuantitatif harus bersifat *perspective emic* artinya memperoleh data bukan sebagaimana seharusnya, bukan berdasarkan apa yang dipikirkan oleh peneliti, tetapi berdasarkan sebagaimana adanya di lapangan, yang dialami, dirasakan, dan dipikirkan oleh partisipan atau sumber data. Berikut data yang ingin peneliti gunakan, yakni terdiri dari data primer dan data sekunder. Irawan (2017) dalam (Tatu Maftuhah, 2017) menjelaskan pengertian dari kedua jenis data tersebut sebagai berikut:

Data Primer adalah data yang diambil langsung, tanpa perantara dari sumbernya. Sumber ini dapat berupa benda-benda, situs, atau manusia.

Data Sekunder adalah: data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder biasanya berupa dokumen-dokumen (laporan, karya tulis orang lain, Koran, majalah.)

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan turun kelapangan memeriksa dan mengobservasi data penelitian yang terdapat dalam dokumentasi, catatan, arsip, dan lainnya. Adapun dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini berupa profil Dinas, catatan laporan keuangan,

serta proses dan cara kerja pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu.

3.5 Teknik Analisis Data

Tahapan yang dilakukan dalam analisis data antara lain sebagai berikut :

Mengidentifikasi Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di dinas ketahanan pangan dan perikanan kabupaten Rokan Hulu pada program ketahanan pangan.

Mengukur Efektivitas Anggaran menggunakan rasio Efektivitas pengelolaan anggaran daerah, dengan rumus :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)}} \times 100\%$$

Tabel 3.4
Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Persentase	Kriteria
100% Keatas	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Dibawah 60%	Tidak Efektif

Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327

Mengukur Efisiensi Anggaran menggunakan Rasio Efisiensi pengelolaan anggaran daerah, dengan rumus :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 3.5
Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Persentase	Kriteria
100% keatas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Efisien
Dibawah dari 60%	Sangat Efisien

Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327

3.6 Jadwal Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini peneliti membuat rencana penelitian, terkhusus dalam jarak waktu penelitian, dalam penelitian ini peneliti merancang melakukan penelitian dalam waktu 3 bulan.

Tabel 3.1
Jadwal penelitian

No	Kegiatan	Bulan											
		November				Desember				Januari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penentuan Judul	■											
2	Penulisan Bab 1		■	■	■								
3	Penulisan Bab 2					■	■	■					
4	Penulisan Bab 3						■	■	■				
5	Seminar Proposal								■				
6	Penulisan Bab 4									■	■		
7	Penulisan Bab 5											■	
8	Seminar Hasil dan Komprehensif												■

Sumber: diolah oleh penulis tahun 2024